

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir **31 Desember** 2019



17

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir **31 Desember** 2019

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Laporan Keuangan sebagai realisasi dari pelaksanaan kegiatan maupun anggaran yang telah tertuang dalam DPA.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

- Ringkasan Laporan Keuangan :
 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 2. Neraca ;
 3. Laporan Operasional (LO);
 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK):
Lampiran Laporan Keuangan :
 - a. SPJ Fungsional Bulan Desember 2019;
 - b. Rekening Koran bank 1 Januari 2019 s.d. 5 Januari 2020;
 - c. Register SP2D 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019;
 - d. Daftar Pengembalian Belanja dan Penyetoran Sisa Kas Tahun 2019 (Lampiran setor ke kas daerah)
 - e. Daftar Jurnal Penyesuaian Akhir Tahun 2019;
 - f. Daftar Rekapitulasi Pemotongan dan Penyetoran Pajak (PPN dan PPh);
 - g. Berita Acara Penutupan Kas (kas opname) Tahun 2019;
 - h. Berita acara persediaan (stock opname) Tahun 2019;
 - i. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan KIB tahun 2019;
 - j. Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang tahun 2019;
 - k. Daftar Utang Tahun 2019;
 - l. Laporan Kinerja SKPD Tahun 2019;
 - m. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Demikian Laporan Keuangan ini kami sampaikan untuk menjadi bahan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Pangkalpinang, 1 Januari 2020

KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Drs. H. TARMIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19681111 199009 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Lampiran
Pernyataan Tanggung Jawab
Ringkasan LK :

Laporan Realisasi Anggaran

Neraca

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

Catatan atas Laporan Keuangan:

PENDAHULUAN

BAB I INFORMASI UMUM

A.1. Penjelasan Umum

A.2. Dasar Hukum

A.3. Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi
Makro

A.4. Kebijakan Akuntansi

BAB II PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI
ANGGARAN(LRA)

B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi
Anggaran (LRA)

B.2. Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran
(LRA)

B.3. Catatan Penting Lainnya

BAB III PEJELASAN POS-POS NERACA

C.1. Penjelasan Umum Neraca

C.2. Penejelasan Per Pos Neraca

c.3 Catatan Penting Lainnya

BAB IV PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

D.1. Ikhtisar Laporan Arus Kas

D.2. Penjelesan Per Pos Laporan Arus Kas

D.3. Catatan Penting Lainnya

BAB V PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN
OPERASIONAL

E.1 Ikhtisar Laporan Operasioanal

E.2 Penjelasan per pos laporan operasional

E.3 Catatan Penting lainnya

BAB VI PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

F.1 Ikhtisar Laporan Perubahan Ekuitas

F.2 Penjelasan per Pos Laporan

F.3 Catatan Penting Lainnya

BAB VII PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. CaLK
6. SPJ Fungsional Bulan Desember 2019;
7. Rekening Koran dari tanggal 1 Januari 2019 s/d 5 Januari 2020
8. Register SP2d 1 Januari 2019 s.d. 5 Januari 2020;
9. Daftar Pengembalian Belanja dan Penyetoran Sisa Kas Tahun 2019 (lampiran bukti setor kas daerah)
10. Daftar Jurnal Penyesuaian Akhir Tahun 2019;
11. Daftar Rekapitulasi Pemotongan dan Penyetoran Pajak (PPN dan PPh);
12. Berita Acara Penutupan Kas (cash Opname) Tahun 2019
13. Berita Acara Persediaan (stock Opname) Tahun 2019 ;
14. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan KIB Tahun 2019;
15. Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Tahun 2019 ;
16. Daftar Utang Tahun 2019 ;
17. Daftar Sp2D Nihil Tahun 2019;
18. Laporan Kinerja SKPD Tahun 2019;
19. Surat Pernyataan Tanggungjawab kepala OPD (format Terlampir)

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri atas (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Neraca; (c) Laporan Operasional (LO); (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, Januari 2020

Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Drs.H.TARMIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19681111 199909 1001

BAB I

PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang- undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46 Tahun 2013 tentang Uraian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 Nomor 33 Seri E);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 43 Seri E);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 81 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor Seri);
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

A.2. Kebijakan Fiskal / Keuangan dan Ekonomi Makro

Pengertian Ekonomi Makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan, menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi rumah tangga dan perusahaan.

Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesiambungan.

Kondisi Ekonomi Makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berikut tingkat pencapaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain product domestic bruto ,produk harga minyak, tingkat suku bunga dan neraca pembayaran

Akibat pengaruh kenaikan dolar terhadap rupiah sangat berdampak sekali pada ekonomi Indonesia secara Makro mengakibatkan daya beli masyarakat cukup rendah,akan tetapi pertumbuhan dan inflansi dapat terjaga dengan baik sehingga hal-hal yang diinginkan tidak terjadi

Kondisi ekonomi secara regional ,pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melambat diakibatkan perlambatan kinerja lapangan usaha utama yang tumbuh terbatas, seperti industri pengolahan pertanian,kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan pertambangan . Tingkat Inflansi diperkirakan masih bisa dikendalikan

Peran serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflansi yang tertinggi adalah bagaimana memantapkan ketahanan ekonomi diadaerah yang subansinya untuk mengantisipasi terjadinya gejolak sosial dimasyarakat yang diakibatkan oleh terpuruknya perekonomian masyarakat yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti pengawasan pemantauan ketahanan ekonomi dengan melibatkan unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, Kabupaten/Kota terkait, organisasi kepemudaan forum kewaspadaan dini masyarakat, forum kerukunan umat beragama, forum pembauran kebangsaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. a gar kondisi inflansi yang tinggi tidak berdampak meluas pada kondisi sosial budaya masyarakat yang akan menimbulkan gejolak-gejolak sosial yang akan menjadi lebih terpuruknya kondisi perekonomian masyarakat Bangka Belitung, indentifikasi dan analisis terhadap permasalahan, saling berkoordinasi dengan instansi terkait yang membidangi perekonomian agar terciptanya stabilitas ekonomi dengan suasana yang kondusif agar kerukunan antar masyarakat setempat dengan bantuan pihak –pihak terkait.

Oleh karena itu pemberdayaan dan pengamanan terhadap masyarakat perlu terus ditingkatkan, dengan cara bekerjasama dan berkoordinasi dengan instansi antar organisasi perangkat daerah yang ada ataupun instansi vertical yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga terciptanya kedamaian masyarakat Bangka Belitung

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan pemerintah dalam rangka melaksanakan kewenangannya dlama penyelenggaraan pelayanan umum dalam

satu anggaran, sesuai dengan pendekatan kinerja dimana setiap alokasi biaya direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat tercapai. Kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah, selanjutnya untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah mengembangkan standar analisa belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya.

Untuk itu dimasa yang akan datang baik sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, kebijakan dan kinerja perlu ditingkatkan dan dikembangkan kearah yang lebih baik sehingga keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat bermanfaat dan berguna dalam menciptakan stabilitas keamanan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada pendapatan, belanja diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). Alokasi anggaran dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, dengan cara mengimplementasi akuntansi pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku. Melalui peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bangka Belitung diharapkan kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya laporan keuangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Sesuai dengan rencana kerja Tahun 2019 anggaran perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 12.069.558.934,06 , maka kebijakan Keuangan Tahun 2019 diarahkan untuk melaksanakan beberapa Program dan Kegiatan:

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah (4 Kegiatan)
2. Program Penguatan Kewaspadaan Nasional (4 Kegiatan)
3. Program Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan (6 Kegiatan)
4. Program Pembinaan Politik Dalam Negeri (10 Kegiatan)

5. Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat (6 Kegiatan)

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan disajikan berdasarkan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam penyajian Neraca, pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas disajikan berdasarkan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui, yaitu:

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan,
- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas. Pengakuan Utang kepada pihak ketiga seperti utang pajak diakui setelah bendahara pengeluaran menerbitkan bukti pemotongan dan uang diterima. Persediaan diakui setiap akhir tahun anggaran dan piutang diakui setiap akhir tahun anggaran. Pengakuan Aset Tetap merupakan pengakuan terhadap perolehan aset yang

dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkaitan dengan belanja modal.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

A.4. Kebijakan Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi pemerintah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan . Tujuan umum laporan dan kinerja keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas memuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambil keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang akan dipercayakan kepadanya.

Basis akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan **basis akrual** dalam penyusunan dan penyajian Neraca, LO dan LPE serta **basis kas** untuk penyusunan dan penyajian LRA. Kegiatan akuntansi pada satuan kerja pemerintah daerah meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh PPK-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. Akuntansi belanja pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini meliputi akuntansi belanja UP (uang persediaan)/GU (ganti uang)/TU (tambah uang), dan akuntansi belanja LS (langsung).

Dokumen sumber yang dijadikan dasar dalam pencatatan transaksi belanja ini adalah sebagai berikut:

1. Belanja dengan mekanisme UP/GU/TU
 - Bukti Pengesahan SPJ
 - SPM

- SPD
 - Bukti transaksi lainnya
2. Belanja dengan mekanisme LS - SP2D
- SPM
 - SPD
 - Nota Debit Bank
 - Bukti pengeluaran lainnya
3. Penerimaan Pajak - Bukti Pemotongan Pajak
4. Penyetoran Pajak – l'd Billing

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah (Kasda).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas umum daerah.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Keuangan Daerah (BAKUDA).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan /atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB II

PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transferr, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;
- c. menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara **komparatif**. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
 - (a). telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
 - (b). telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
 - (c). telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Surplus/defisit-LRA
5. Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil diinvestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

B.2. Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2019 adalah NIHIL berupa Pendapatan Daerah berupa pajak dan retribusi, hal ini dikarenakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan OPD pengelola pendapatan daerah maka realisasi pendapatan sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0,00% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 0,00

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 10.988.846.808 atau 92,92% mencapai dari alokasi anggaran sebesar Rp.11.826.682.126,00

B.2.1 Pendapatan LRA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ditugaskan untuk mengelola pendapatan baik yang bersumber dari pendapatan pajak maupun retribusi daerah, sehingga tidak terdapat anggaran pendapatan dalam DPA Tahun Anggaran Anggaran 2019 atau Nihil.

B.2.2 Belanja

Realisasi belanja tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 10.988.846.808 atau mencapai 92,92 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 11.826.682.126,- Rincian realisasi belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Alokasi dana/plafon belanja pegawai Tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp.6.140.733.646 teralisasi sebesar Rp 5.794.474.967,- atau 94,36 , yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan.

Tabel 2 REALISASI BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN TA. 2019
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA PAGU ANGGARAN
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,902,308,000.00	1,873,752,340.00	98.50	28,555,660.00
2	Tunjangan Keluarga	200,292,720.00	189,211,532.00	94.47	11,081,188.00
3	Tunjangan Jabatan	216,860,000.00	215,880,000.00	99.55	980,000.00
4	Tunjangan Fungsional	10,260,000.00	7,560,000.00	73.68	2,700,000.00
5	Tunjangan Fungsional Umum	54,540,000.00	51,840,000.00	95.05	2,700,000.00
6	Tunjangan Beras	109,571,460.00	101,894,940.00	92.99	7,676,520.00
7	Tunjangan PPh/Khusus	16,880,000.00	8,344,274.00	49.43	8,535,726.00
8	Pembulatan Gaji	30,110.00	27,467.00	91.22	2,643.00
9	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	20,084,356.00	15,385,613.00	76.60	4,698,743.00
10	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	54,240,000.00	52,930,201.00	97.59	1,309,799.00
11	Tunjangan Kinerja	-	-	0.00	-
12	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3,527,111,000.00	3,256,186,600.00	92.32	270,924,400.00
13	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	28,556,000.00	21,462,000.00	75.16	7,094,000.00
	JUMLAH	6,140,733,646.00	5,794,474,967.00	94.36	346,258,679.00

2. Belanja Barang dan Jasa

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun Anggaran 2019 mendapatkan alokasi dana Belanja Barang dan jasa sebesar Rp. 5.476.748.480 dan terealisasi sebesar Rp.4.986.945.601 atau 91,06

3. Belanja Modal

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2019 mendapat alokasi dana untuk belanja modal sebesar Rp.209.200.000,00 terdiri dari Belanja . Pada tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp. 207.426.240,- atau 99,15 sebesar

B.3. Catatan Penting lainnya

Realisasi pencapaian target keuangan untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 10.988.846.808(Sepuluh milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan rupiah atau mencapai 92,92 % dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp 11.826.682.126 ,-. (*sebelas milyar delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua ribu seratu dua puluh enam rupiah*)

Pencapaian kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2019 tercantum pada tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4. Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN BELANJA	TARGET	REALISASI	% Realisasi
	Belanja	11.826.682.126,00	10.988.846.808,00	92,92
	Belanja Tidak Langsung	6.140.733.646,00	5.794.474.967,00	94,36
	Belanja Pegawai	6.140.733.646,00	5.194.371.841,00	91,35
	Belanja Lansung	5.685.984.480,00		
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	2.974.254.680,00	2.840.981.605,00	95,52
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.449.254.680,00	2.360.723.415,00	96,39
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	483.780.000,00	441.092.390,00	91,18
3	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17.970.000,00	16.168.600,00	89,98
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.250.000,00	22.997.200,00	98,91
	Program Penguatan Kewaspadaan Nasional	312.898.000,00	111.690.694,00	52,46
5	Penguatan Kerjasama Intelijen Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pencegahan Konflik Sosial dan aksi terorisme	4.920.000,00	4.885.000,00	99,29
6	Forum Komonikasi dan Koordinasi Kominda	5.900.000,00	3.705.000,00	62,80
7	Penguatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini serta Pengawasan orang Asing di Bangka Belitung	32.120.000,00	15.299.800,00	47,63
8	Penyelenggaraan Penanganan Konflik Sosial	169.958.000,00	87.800.894,00	51,66
	Program Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	1.618.009.000,00	1.497.103.650,00	92,53

9	Pembinaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	172.700.000,00	124.795.700,00	72,26
10	Pembentukan Pendidikan dan Pelatihan Kader bela negara	81.345.000,00	71.200.000	87,53
11	Penguatan Forum Kebangsaan (FPK)	91.450.000,00	65.590.300	71,72
12	Forum Dialog Penguatan idiologi bangsa (4 Konsesus kebangsaan) dalam rangka mencegah budaya dan idiologi yang bertentangan dengan Pancasila	20.580.000,00	18.722.600,00	90,97
13	Gerakan Revolusi Mental di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	73.950.000,00	62.141.700,00	84,03
14	Peningkatan Kecintaan terhadap NKRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.177.984.000,00	1.154.653.350,00	98,02
	Program Pembinaan Politik dalam Negeri	669.980.000,00	564.440.852,00	84,25
15	Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pemilu /Pemilukada	79.950.300,00	79.942.300,00	99,99
16	Monitoring dan Pemantauan Perkembangan situasi Politik di daerah	14.400.000,00	11.273.000.00	78,28
17	Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik	136.700.000,00	115.579.200,00	84,55
18	Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	133.074.700,00	105.361.352,00	79,17
19	Penguatan Kapasitas Kelembagaan/Intitusi Demokrasi dalam Pembangunan Politik Indonesia	69.300.000,00	58.998.200,00	85,13
20	Peningkatan Kualitas peran dan fungsi Parpol dalam rangka penguatan Leadership dan Ka	24.450.000,00	21.438.200,00	87,68
21	Penyusunan Data Base Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Parpol (KPPP)	5.550.000,00	5.490.500,00	98,93
22	Verifikasi Penyaluran Keuangan Partai Politik	14.300.000,00	4.491.000,00	31,41
24	Sosialisasi Undang-undang mengenai Politik	192.225.000,00	161.867.100,00	84,19
	Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya ,Agama dan Kemsyarakatan	210.806.800,00	180.155.040,00	85,46
25	Evaluasi dan Verifikasi data Ormas	3.325.000,00	2.449.440,00	73,67
26	Forum Komonikasi dan Kerjasama antar Umat Beragama	85.921.800,00	76.872.400,00	89,47
27	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan tentang Ormas	31.275.000,00	24.709.000,00	79,01
28	Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika	62.200.000,00	55.792.200,00	89,70
29	Evaluasi Data dan Informasi Lembaga Usaha Ekonomi serta	5.250.000,00	2.800.000,00	53,33

	Pemantauan Stabilitas Harga Sembako di Daerah			
30	Workshop Optimalisasi peran Aparatur,Ormas dan Masyarakat dalam menjaga seni dan Budaya	22.835.000,00	17.532.000,00	76,78

BAB III

PENJELASAN ATAS POS – POS NERACA

C.1. Penjelasan Umum Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada periode tertentu. Unsur neraca dalam basis akrual adalah:

- 1) Aset; sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 2) Kewajiban; utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- 3) Ekuitas (tanpa dirinci lebih lanjut ke ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan sebagaimana dalam basis kas menuju akrual); kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

C.2. Penjelasan Per Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

C.2.1 Aset

A. Aset Lancar

Penjelasan masing-masing pos aset lancar sebagai berikut :

1. Kas dan Setara Kas

Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.Nihil

2. Piutang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki piutang

3. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual / diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Organisasi perangkat daerah.

Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2019, dikalikan dengan harga pembelian terakhir.

Saldo persediaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 0.

Tabel 5. Rincian Persediaan Tahun Anggaran 2019
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Uraian	Belanja	Mutasi	Saldo
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	-	-	-
2	Barang cetak dan pengadaan	-	-	-
3	Penyediaan surat menyurat	-	-	-
	Saldo			-

B. Aset Tetap

Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional OPD. Jenis dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Aset Tetap	Tahun 2018	Penambahan 2019	Pengurangan 2019	Total
Tanah	27,571,086.00	0.00	0.00	27,571,086.00
Peralatan dan Mesin	1,640,006,751.00	406,481,240.00	0.00	2,046,487,991.00
Gedung & Bangunan	3,143,224,800.00	0.00	0.00	3,143,224,800.00
Jalan, Irigasi & Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00
Aset Tetap Lainnya	68,950,625.00	0.00	0.00	68,950,625.00
Akumulasi penyusutan Aset Tetap	(2,144,981,240.00)	0.00	315,508,545.00	(2,460,489,785.00)
Jumlah Aset Tetap	2,734,772,022.00	406,481,240.00	315,508,545.00	2,825,744,717.00

Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap semester per 31 Desember 2019, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.27.571.086,00

2. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2019 sebesar Rp.2.046.687.991 yang semula per 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.604.006.751 ada penambahan aset sebesar Rp 406.481,240,-(Kib Adan B terlampir)

Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 3.143.224.800,00 tidak ada penambahan gedung atau bangunan

3. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pada tahun anggaran 2019 saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0

C. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp 68.950.625,00 angka tersebut berasal dari saldo awal tahun 2018

D. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam pengerjaan yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00 nilai tersebut sama dengan saldo tahun 2018

E. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2019 sebesar (2.460.489.785,00). Adapun akumulasi penyusutan tahun 2018 sebesar Rp (.2.144.981.240,00)

Adapun rincian akumulasi penyusutan aset tetap pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8. Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember TA 2019
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

URAIAN	Saldo 2018	Penyusutan	Saldo 2019
Akumulasi Penyusutan			
Akumulasi Penyusutan alat-alat bantu	70,514,882.00	19,678,571.00	90,193,453.00
Akumulasi Penyusutan Alat -alat angkutan	245,162,000.00	157,115,952.00	402,277,952.00
Akumulasi Penyusutan alat alat bengkel dan alat bantu	13,850,000.00	0.00	13,850,000.00
Akumulasi Penyusutan alat pengelohan	0.00	5,117,936.00	5,117,936.00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	297,004,666.00	4,560,000.00	301,564,666.00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	255,145,335.00	28,298,501.00	283,443,836.00
Akumulasi Penyusutan peralatan Komputer	433,811,920.00	22,076,972.00	455,888,892.00
Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	108,199,315.00	15,632,800.00	123,832,115.00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio	57,595,000.00	3,329,333.00	60,924,333.00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00
Akumulasi Penyusutan bangunan Gedung tempat kerja	661,548,122.00	59,698,480.00	721,246,602.00
	2,144,981,240.00	315,508,545.00	2,460,489,785.00

F. Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp.499.151.167,00.

Tabel 9. Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2019
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Aset	Saldo Awal	Reklasifikasi	Akum Penyusutan	Jumlah
ASET LAINNYA				
Aset Lain-Lain	499.151.167,00	-	-	499.151.167,00
				499.151.167,00

G. Barang Milik Daerah Non Neraca

Saldo Barang Milik Daerah Non Neraca berupa Ekstrakompable sebesar Rp. 145.957.000,-

C.2.2 KEWAJIBAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 31 Desember Tahun 2019 memiliki Kewajiban jangka pendek.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Beban tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Bulan Desember 2019 sebesar Rp 232.171.200,-

C.2.3 EKUITAS

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.3.092.724.684

C.3. Catatan Penting Lainnya

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode Tahun 2019 atau periode 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp. yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar 0 dengan rincian: Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.0 nilai tersebut merupakan Sisa Belanja Ganti Uang (GU) yang belum disetorkan pada 31 Desember 2019,

Nilai Kewajiban sebesar Rp 232.171.200,- merupakan Utang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bulan Desember 2019 dan Nilai Ekuitas sebesar Rp. 3.092.724.684,-. Jadi Jumlah kewajiban dan ekuitas dana sebesar Rp.3.324.895.884,-

Tabel 10. NERACA
Periode 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	2019	2018
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran		4.085.500,00
Persediaan	-	1.635.000,00
JUMLAH ASET LANCAR	-	5.720.500,00
ASET TETAP		
Tanah	27.571.086,00	27.571.086,00
Peralatan dan Mesin	2.046.487.991,00	1.640.006.751,00
Gedung dan Bangunan	3.143.224.800,00	3.143.224.800,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	68.950.625,00	68.950.625,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan	(2.460.489.785,00)	(2.144.981.240,00)
JUMLAH ASET TETAP	2.825.744.717,00	2.734.772.022,00
ASET LAINNYA		
Aset Lain-lain	499.151.167,00	499.151.167,00
JUMLAH ASET LAINNYA	499.151.167,00	499.151.167,00
JUMLAH ASET	3.324.895.884,00	3.239.643.689,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Beban	232.171.200,00	191.411.400,00
Utang Jangka Pendek lainnya		
Kewajiban untuk dikonsolidasikan		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	232.171.200,00	191.411.400,00
JUMLAH KEWAJIBAN	232.171.200,00	191.411.400,00
EKUITAS		
EKUITAS	3.092.724.684,00	7.264.231.029,83

BAB IV

PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN ARUS KAS

D.1. Ikhtisar Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Manfaat informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas)

D.2. Penjelasan Per Pos Laporan Arus Kas

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari **penerimaan dan pengeluaran kas**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk

mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

Dalam hal entitas bersangkutan masih membukukan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran maka laporan arus kas dapat disajikan dengan mengacu pada akun-akun pelaksanaan anggaran tersebut. Yang dimaksud dengan akun-akun pelaksanaan anggaran adalah akun yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan transaksi nonanggaran, yang dalam Laporan Arus Kas dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

AKTIVITAS OPERASI

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- (a) Penerimaan Perpajakan;
- (b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- (c) Penerimaan Hibah;
- (d) Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya;
- (e) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa; dan
- (f) Penerimaan Transfer.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

- (a) Pembayaran Pegawai;
- (b) Pembayaran Barang;
- (c) Pembayaran Bunga;
- (d) Pembayaran Subsidi;
- (e) Pembayaran Hibah;
- (f) Pembayaran Bantuan Sosial;

- (g) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa; dan
- (h) Pembayaran Transfer.

Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

AKTIVITAS INVESTASI

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- (a) Penjualan Aset Tetap;
- (b) Penjualan Aset Lainnya;
- (c) Pencairan Dana Cadangan;
- (d) Penerimaan dari Divestasi;
- (e) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- (a) Perolehan Aset Tetap;
- (b) Perolehan Aset Lainnya;
- (c) Pembentukan Dana Cadangan;
- (d) Penyertaan Modal Pemerintah;
- (e) Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.

AKTIVITAS PENDANAAN

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- (a) Penerimaan utang luar negeri;
- (b) Penerimaan dari utang obligasi;
- (c) Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah;
- (d) Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- (a) Pembayaran pokok utang luar negeri;
- (b) Pembayaran pokok utang obligasi;
- (c) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah;
- (d) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara

AKTIVITAS TRANSITORIS

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran

D.3. Catatan Penting Lainnya

PEMERINTAH PUSAT			
LAPORAN ARUS KAS			
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0			
Metode Langsung			
(Dalam Rupiah)			
No.	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Penghasilan	XXX	XXX
4	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	XXX	XXX
5	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	XXX	XXX
6	Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	XXX	XXX
7	Penerimaan Cukai	XXX	XXX
8	Penerimaan Pajak Lainnya	XXX	XXX
9	Penerimaan Bea Masuk	XXX	XXX
10	Penerimaan Pajak Ekspor	XXX	XXX
11	Penerimaan Sumber Daya Alam	XXX	XXX
12	Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	XXX	XXX
13	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	XXX	XXX
14	Penerimaan Hibah	XXX	XXX
15	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX
16	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)	XXX	XXX
17	Arus Keluar Kas		
18	Pembayaran Pegawai	XXX	XXX
19	Pembayaran Barang	XXX	XXX
20	Pembayaran Bunga	XXX	XXX
21	Pembayaran Subsidi	XXX	XXX
22	Pembayaran Bantuan Sosial	XXX	XXX
23	Pembayaran Hibah	XXX	XXX
24	Pembayaran Lain-lain	XXX	XXX
25	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
26	Pembayaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
27	Pembayaran Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
28	Pembayaran Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
29	Pembayaran Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
30	Pembayaran Dana Penyesuaian	XXX	XXX
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	XXX	XXX
32	Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 31)	XXX	XXX
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 32)	XXX	XXX
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
35	Arus Masuk Kas		
36	Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
37	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
38	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
39	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
40	Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
41	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
42	Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX
43	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	XXX	XXX
44	Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 43)	XXX	XXX

BAB V

PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1. Ikhtisar Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

- 1) mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- 2) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 3) yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- 4) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

E.2. Penjelasan Per Pos Laporan Operasional

Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan

klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

Laporan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 31 Desember 2019 memuat beberapa unsur sebagai berikut:

1. Pendapatan LO

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0,00% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0,00.

2. Beban

2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.191.634.767 dan Rp. 5.543.171.527

Beban Pegawai merupakan beban untuk mencatat gaji dan tunjangan. Rincian Beban pegawai TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Beban Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Jenis Beban Pegawai	2019	2018	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Beban Pegawai LO	6.191.634.767,00	5.543.171.527,00	648.463.240,00	11,70
	Jumlah	6.191.634.767,00	5.543.171.527,00	648.463.240,00	11,70

1. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.024.192.560 dan per 31 Desember 2018 Rp.777.177.300,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai.

2. Beban Barang Dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa dikelompokkan menjadi Beban persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas, untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2019 dan 31 desember 2018 beban Jasa perjalanan dinas sebesar Rp 3.629.273.041

dan 2.538.333.041 Untuk melihat rincian perbandingan jumlah beban dimaksud dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 17. Perbandingan Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 dan 2018

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Jenis Beban Persediaan	2019	2018	Kenaikan/ penurunan	%
1	Beban Persediaan	1.024.192.560,00	777.177.300,00		
2	Beban Jasa	1.747.545.664,00	1.461.754.368,00	285.791.296,00	19,55
3	Beban Pemeliharaan	240.157.650,00	179.238.050,00	60.919.600,00	33,99
4	Beban Perjalanan Dinas	1.641.569.727,00	897.340.623,00	744.229.104,00	82,94
	Jumlah	3.629.273.041,00	2.538.333.041,00	1.090.940.000,00	136,48

3. Beban Penyusutan Dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Desember 2019 dan 31 desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 315.508.545 dan Rp. 203.396.819 Jika dibandingkan dengan tahun 2018 beban penyusutan mengalami kenaikan sebesar 55,12%.

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 desember 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	2019	2018	%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	315,508,545.00	203,396,819.00	55.12
Jumlah	315,508,545.00	203,396,819.00	55.12

5.2.1 Surplus/defisit dari kegiatan Operasional

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Desember 2019 adalah sebesar Rp (11.160.608.913) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional per 30 Desember 2019 dan 2018

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Uraian	2019	2018	(%)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(11,160,608,913.00)	(9,062,078,687.00)	23.16
Jumlah	(11,160,608,913.00)	(9,062,078,687.00)	23.16

5.2.2 Surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah Nihil.

5.2.3 Pos luar biasa

Pada Badan dan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada penambahan ataupun pengurangan ekuitas dari pos luar biasa baik yang bersumber dari koreksi nilai persediaan, revaluasi aset tetap atau sumber-sumber lainnya. Sehingga jumlah surplus defisit LO dan beban luar biasa Nihil

E.3. Catatan Penting Lainnya

Laporan Operasional menggambarkan posisi pendapatan dan beban, dimana pendapatan sebesar Rp. 0 (nol rupiah) dan Beban sebesar Rp. 11.160.608.913,00 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp. 6.191.634.767,00 ,beban barang dan jasa sebesar Rp. 3.629.273.041,00 dan beban penyusutan sebesar Rp 315.508.545,00

Tabel 10. LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2017	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN	11.160.608.913,00	9.062.078.687,00	2.098.530.226,00	23,16
Beban Pegawai - LO	6.191.634.767,00	5.543.171.527,00	648.463.240,00	11,70
Beban Persediaan	1.024.192.560,00	777.177.300,00	247.015.260,00	31,78
Beban Jasa	1.747.545.664,00	1.461.754.368,00	285.791.296,00	19,55
Beban Pemeliharaan	240.157.650,00	179.238.050,00	60.919.600,00	33,99
Beban Perjalanan Dinas	1.641.569.727,00	897.340.623,00	744.229.104,00	82,94
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	315.508.545,00	203.396.819,00	112.111.726,00	55,12
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainny	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(11.160.608.913,00)	(9.062.078.687,00)	(2.098.530.226,00)	(23,16)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(11.160.608.913,00)	(9.062.078.687,00)	(2.098.530.226,00)	23,16
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB VI

PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

F.1. Penjelasan Umum

1. Ikhtisar Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang menambah dan mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar misalnya:

1. Koreksi kesalahan yang mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya
2. Perubahan Nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap

Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan menyediakan informasi mengenai selisih antara Aset dengan kewajiban dalam satu periode.

Tujuan pelaporan perubahan ekuitas adalah memberikan informasi tentang ekuitas awal, surplus/defisit LO, Dampak Akumulatif atas perubahan nilai aset tetap dan terakhir menggambarkan berapa besar ekuitas akhir

E.2. Penjelasan Per Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-Ekuitas awal yang merupakan saldo dari ekuitas akhir tahun sebelumnya diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

Laporan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 31 Desember 2019 memuat beberapa unsur sebagai berikut:

E.2.1 Ekuitas Awal

Ekuitas akhir 2018 akan menjadi ekuitas awal 2019. Ekuitas awal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp 3.048.232.280

E.2.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Surplus/Defisit –LO tahun per 31 Desember Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. (11.160.608.913)

E.2.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 220.340.000,-

E.2.4 KOREKSI EKUITAS LAINNYA

Koreksi ekuitas lainnya tahun anggaran 2019 semester adalah sebesar Rp 10.984.761.308

E.2.5 EKUITAS AKHIR

Ekuitas akhir tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp 3.092.724.684

F.2. Catatan Penting Lainnya

Laporan Perubahan Ekuitas atas perubahan ekuitas menggambarkan posisi Ekuitas awal dan ekuitas akhir, dimana ekuitas awal sebesar Rp 3.048.232.289, surplus/ defisit LO (11.160.608.913,00) Koreksi ekuitas lainnya Rp. 220.340.000, Kewajiban untuk dikonsolidasikan Rp. 10.984.761.308 menjadi Ekuitas akhir 3.092.724.684

BAB VII

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan salah satu komponen laporan keuangan disamping, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca. Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan narasi dari pelaporan keuangan yang dapat dimengerti untuk dibaca oleh Publik. Oleh karena itu Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) memuat aspek-aspek yang memadai dan lengkap menjadi informasi yang sangat berguna bagi pengambil keputusan atau bagi pengguna anggaran. Semoga Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) bermanfaat bagi kita semua.

B. Dengan membaca Catatan Atas Laporan Keuangan ini diharapkan kepada semua pihak dapat membantu dan mengoreksi, mengkritik, memberi saran dalam penyajian catatan atas laporan keuangan ini, supaya kedepannya dapat memberikan manfaat bagi kita semua